

ANALISIS VARIANS DAN PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018-2021

Yolanda Afri Liyani¹, Vara Tiska Luthfita Desanti Putri Suharto²,
Risma Wira Bharata³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar Magelang

E-mail: ¹⁾ yolandaafriyani@gmail.com, ²⁾ varatiska@gmail.com, ³⁾ rismawirab@gmail.com

Abstract

To effectively manage the Regional Expenditure Budget, a control system is needed that takes into account the factors influencing budget preparation. The objective of allocating the Regional Expenditure Budget is to achieve a balance between expenditures and cash receipts. This study aims to evaluate the variance and growth of regional expenditure. The research method used is descriptive analysis, utilizing primary data obtained from the Magelang City Government. The results of the research conducted on the Office of Financial Management and Government Property of Magelang City demonstrated that the financial performance of the Magelang City Government can be assessed through variance analysis of expenditures. The average value of the difference (variance) is 26.7, while the average utilization or absorption of the expenditure budget is 73.14%. Based on these calculations, it can be concluded that the government has effectively accomplished budget planning and efforts to utilize the budget. Budget utilization of more than 90% indicates efficient use of the budget, while utilization of less than 90% suggests a lack of budget planning.

Keywords: Expenditure Growth, Variance Analysis, Expenditure Budget

Abstrak

Untuk menjalankan Anggaran Belanja Daerah dengan efektif, diperlukan sistem pengendalian yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Tujuan dari pengalokasian Anggaran Belanja Daerah adalah mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan kas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi varians dan pertumbuhan belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari Pemerintah Kota Magelang. Hasil penelitian pada Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kota Magelang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat dari analisis varians belanja. Nilai rata-rata selisih (variens) adalah 26,7, sementara rata-rata penggunaan atau penyerapan anggaran belanja adalah 73,14%. Berdasarkan perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran dan upaya penggunaan anggaran secara efektif telah berhasil dengan baik oleh pemerintah. Penggunaan anggaran lebih dari 90% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, sedangkan penggunaan kurang dari 90% menunjukkan kurangnya perencanaan anggaran.

Kata Kunci: Pertumbuhan Belanja, Analisis Varians, Anggaran Belanja

1. PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor publik, yang memiliki dampak pada sektor swasta dan sosial. Pemerintah mewajibkan instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi mereka sebagai tanda keberhasilan atau kegagalan (Purwaningsih & Priyono, 2021). Salah satu sektor pemerintah yang penting dalam membangun perekonomian adalah otonomi daerah (Hasanah & Vidiyastutik, 2018). Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, sehingga instansi pemerintah perlu memiliki pimpinan yang efektif dan efisien untuk mengelola dengan baik.

Untuk mewujudkan *good governance*, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didasarkan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun setiap tahun anggaran, terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD juga memastikan adanya disiplin dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan dan belanja daerah (Adisasmita, 2011).

Standar Analisa Belanja (SAB) adalah panduan yang digunakan untuk menganalisis kecukupan beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah satuan kerja dalam satu tahun anggaran (Adisasmita, 2011). Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD sesuai dengan prinsip dasar belanja, yaitu secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) (Kasi, 2013; Kawatu, 2019). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah sebenarnya dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai *good governance* (Kainde, 2013). Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang mematuhi standar tersebut memenuhi tiga elemen *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Mahmudi, 2012).

Setiap anggaran belanja yang diterima oleh instansi pemerintah daerah berperan dalam mendukung pertumbuhan belanja daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap Kota/Kabupaten (Utami & Astutik, 2022). Pada tahun 2021, Kota Magelang meraih predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam Laporan Keuangan untuk keenam kalinya dan mencatat perkembangan dalam hal sarana dan prasarana umum. Melihat hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai rata-rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Magelang dalam periode tahun 2018 hingga 2021.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah kegiatan penyediaan informasi keuangan dari entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Hal ini melibatkan pengukuran, pelaporan, dan analisis informasi keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Standar akuntansi yang relevan, seperti SAP atau IPSAS, digunakan dalam memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi. Akuntansi sektor publik juga mendukung transparansi, akuntabilitas pemerintah,

serta membantu dalam perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja keuangan. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2009).

2.2. Analisis Anggaran

Anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk masa depan dalam organisasi sektor publik. Hal ini mencakup periode satu tahun dan dinyatakan dalam nilai mata uang. Anggaran berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat guna dan merencanakan program-program yang akan dilaksanakan. Penyusunan anggaran melibatkan estimasi biaya, penentuan prioritas, dan pengawasan penggunaan dana.

Anggaran juga mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dengan anggaran yang transparan, masyarakat dapat melihat penggunaan dana publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, anggaran membantu dalam perencanaan jangka panjang dan strategis, memprioritaskan program-program yang memiliki dampak jangka panjang yang signifikan (Mahsun, 2006).

Penting untuk memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan dalam penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran yang adil memastikan distribusi yang merata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Aspek keberlanjutan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat di masa depan.

Dengan demikian, anggaran dalam sektor publik memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Melalui penyusunan anggaran yang baik, sektor publik dapat mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Analisis Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup semua kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dan mengakibatkan pengurangan nilai kekayaan bersih atau ekuitas dana dalam satu periode tahun anggaran. Dalam upaya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, belanja daerah harus ditentukan berdasarkan estimasi beban pengeluaran yang adil dan merata, sehingga masyarakat dapat secara relatif menikmati pelayanan publik yang diberikan. Pada tahun anggaran 2011, pemerintah daerah menetapkan target pencapaian yang sesuai dengan kewenangannya, baik dalam konteks daerah, satuan kerja, maupun kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Analisis belanja daerah sangat penting untuk mengevaluasi penggunaan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur sejauh mana efisiensi pengeluaran anggaran, menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dalam penelitiannya, Mahmudi (2012) menekankan pentingnya analisis belanja daerah sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara keseluruhan. Dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan berbagai jenis analisis anggaran, termasuk analisis variasi belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis kesesuaian belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio belanja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Mahmudi, 2012).

Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengeluaran mereka, mengidentifikasi potensi penghematan, dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat. Hal ini juga membantu dalam perencanaan anggaran untuk tahun-tahun mendatang dan membantu masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan analisis belanja daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi dana dan meningkatkan manfaat yang diperoleh masyarakat dari APBD.

2.4. Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja

Dalam hal pengelolaan belanja daerah, terdapat aturan yang menyebutkan bahwa anggaran belanja adalah batasan maksimum pengeluaran yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Evaluasi kinerja belanja pemerintah daerah akan dianggap baik jika realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Analisis varians digunakan untuk memeriksa perbedaan antara realisasi belanja dan anggaran.

Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi belanja dan anggaran, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, perbedaan yang kecil menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kedua, perbedaan yang besar dapat menunjukkan kelemahan dalam perencanaan anggaran, seperti estimasi belanja yang tidak akurat atau program kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun sudah dialokasikan dalam anggaran.

Dalam rangka mengetahui penyebab perbedaan tersebut, DPRD perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah perbedaan tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau disebabkan oleh ketidakefisienan anggaran yang ditetapkan. Dengan berdialog dan melakukan klarifikasi antara DPRD dan pihak eksekutif, dapat terungkap faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, seperti perubahan kebijakan, pengalihan anggaran, atau kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan.

Selain itu, DPRD juga dapat mengevaluasi mekanisme penganggaran dan pengawasan yang ada untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber: (Mardiasmo, 2009)

Analisis pertumbuhan belanja sangat penting untuk melacak perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Secara umum, belanja cenderung meningkat seiring waktu. Kenaikan belanja sering kali terkait dengan penyesuaian faktor-faktor ekonomi makro. Namun, dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mampu mengendalikan belanja daerah, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan melakukan penghematan anggaran.

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana belanja masing-masing sektor mengalami pertumbuhan, dan apakah pertumbuhan tersebut dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus disesuaikan dengan

pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Jika tidak dilakukan dengan seimbang, dalam jangka panjang hal ini dapat mengganggu kelangsungan dan kesehatan fiskal daerah.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memantau pertumbuhan belanja dengan cermat dan memastikan bahwa belanja yang meningkat sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah. Hal ini akan membantu mencegah defisit anggaran yang tidak terkendali dan menjaga keseimbangan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan belanja yang efisien dan penghematan anggaran juga harus menjadi fokus penting dalam upaya mencapai kesinambungan fiskal dan menjaga kesehatan keuangan daerah.

Pertumbuhan Belanja Daerah dapat dihitung dengan rumus

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Thn } (t - 1)}$$

Sumber: (Mahmudi, 2012)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data runtun waktu (time series), yang nilainya diambil secara berurutan selama periode tahun 2018-2021. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data untuk desain riset kuantitatif. Dokumen dan arsip yang relevan, seperti struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah serta laporan realisasi anggaran, digunakan sebagai sumber informasi. Data laporan keuangan periode 2018-2021 dikumpulkan dan dianalisis, diikuti dengan penjelasan terhadap temuan yang ditemukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan analisis pengeluaran daerah, proses perhitungan menggunakan rumus berikut ini berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Magelang untuk periode anggaran 2018-2021. Sebelum menggunakan data yang terdapat dalam LRA, penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah diaudit guna memastikan pengendalian keuangan pemerintah yang baik, serta agar penggunaan data menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Angka-angka yang terdapat dalam LRA kemudian dimasukkan ke dalam rumus perhitungan yang sesuai.

4.1. Analisis Varians Belanja

Analisis belanja daerah yang menggunakan rumus varians belanja daerah menunjukkan bahwa varians (selisih) antara realisasi belanja dengan anggaran belanja Pemerintah Kota Magelang periode 2018-2021 bertanda negatif. Yang berarti bahwa realisasi belanja di bawah anggaran yang ditetapkan. Pengeluaran di bawah anggaran disebut varian yang menguntungkan atau disukai yang disebut dengan *favourable variance*. Perbedaan besar antara pelaksanaan dan pengeluaran anggaran menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, ini bisa menjadi indikasi penggunaan anggaran yang efektif, dan kedua, jika perbedaannya

cukup besar, ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam penganggaran sehingga perkiraan pengeluarannya tidak benar, atau ini mungkin terjadi. Program atau kegiatan yang melakukan ini tidak dilaksanakan.

**Tabel 1. Analisis Varians Belanja Pemerintah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018-2021**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih	Selisih %	Penyerapan Belanja %
(a)	(b)	(c)	(d=c-b)	(e=d/b)	(f=c/b)
2018	1.066.383.927.000	937.339.746.423	129.044.180.577	12,1	87,9
2019	1.093.001.723.000	994.945.773.787	98.055.949.213	8,97	91,03
2020	911.224.266.000	285.800.553.441	625.423.712.559	68,63	31,36
2021	1.136.283.529.894	935.047.734.177	201.235.795.717	17,7	82,29

Berdasarkan Tabel 1 dan menggunakan rumus analisis varians belanja, didapatkan hasil selisih antara anggaran dan realisasi dalam periode tahun anggaran 2018-2021. Varians (selisih) tersebut terurai sebagai berikut: pada tahun 2018, terdapat selisih sebesar Rp. 129.044.180.577 atau 12,1%; pada tahun 2019, selisihnya adalah Rp. 98.055.949.213 atau 8,97%; pada tahun 2020, selisih mencapai Rp. 625.423.712.559 atau 68,63%; dan pada tahun 2021, selisihnya adalah Rp. 201.235.795.717 atau 17,7%. Dari data ini, dapat diketahui bahwa varians (selisih) belanja daerah Pemerintah Kota Magelang dalam periode tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2020, sementara selisih terendah terjadi pada tahun 2019.

Selain itu, Tabel 1 juga memperlihatkan besarnya anggaran belanja dalam periode tahun 2018-2021, dengan persentase masing-masing adalah 87,9%, 91,03%, 31,36%, dan 82,29%. Data penggunaan atau penyerapan anggaran menunjukkan efisiensi atau penghematan anggaran. Sebagai contoh, tingkat penggunaan anggaran belanja tertinggi tercatat pada tahun 2019, di mana 91,03% dari anggaran belanja telah digunakan. Hal ini menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp. 98.055.949.213 atau 8,97% dari total belanja. Penggunaan anggaran lebih dari 90% menunjukkan perkembangan ekonomi yang baik, karena menunjukkan bahwa 91,03% dari belanja daerah telah digunakan untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Penghematan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai anggaran tahun depan.

Namun, pemanfaatan anggaran yang kurang dari 90% mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran yang perlu ditinjau kembali, seperti program atau kegiatan yang belum dilaksanakan. Pemanfaatan anggaran pada periode 2018-2021 yang kurang dari 90% menunjukkan adanya kesenjangan dalam perencanaan anggaran tahun terkait, yang perlu dinilai oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, perlu diapresiasi peningkatan penggunaan anggaran belanja dalam periode 2018-2021, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kinerja keuangan pada periode anggaran tersebut. Pemanfaatan anggaran belanja harus terus ditingkatkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan.

4.2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan tabel kedua, hasil perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2021, belanja daerah Pemerintah Kota Magelang meningkat sebesar presentase (pertumbuhan belanja) dan juga mengalami penurunan. Penurunan belanja terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,14%, mengalami pertumbuhan belanja pada tahun 2020 sebesar 71,27% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,27%.

Pertumbuhan belanja daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2018-2021 bervariasi. Pengeluaran meningkat paling banyak pada tahun 2020 dan paling sedikit pada tahun 2021.

**Tabel 2. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018-2021**

Tahun	Realisasi Belanja Th t-1	Realisasi Belanja Th t	Kenaikan / (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(e=d/b)
2017 - 2018	879.408.181.447	937.339.746.423	57.931.564.976	6,58
2018 - 2019	937.339.746.423	994.945.773.787	57.606.027.364	6,14
2019 - 2020	994.945.773.787	285.800.553.441	709.145.220.346	71,27
2020 - 2021	285.800.553.441	935.047.734.177	649.247.180.736	2,27

Peningkatan belanja daerah atau pertumbuhan belanja daerah dari tahun anggaran ke tahun anggaran selanjutnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor yang memainkan peran penting adalah tingkat inflasi tahun ini, yang dapat mempengaruhi nilai uang dan harga barang dan jasa. Selain itu, adanya tambahan cakupan layanan publik juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan belanja daerah. Jika terdapat penambahan program atau proyek baru yang memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, maka belanja daerah dapat meningkat.

Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan belanja daerah. Jika populasi daerah meningkat, maka permintaan akan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat, yang memerlukan alokasi anggaran tambahan. Selanjutnya, faktor internal dalam pengelolaan anggaran juga berperan, seperti perencanaan anggaran yang terencana dengan baik dan pengawasan anggaran yang efektif. Jika pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, termasuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien, maka pertumbuhan belanja daerah dapat tercapai secara positif.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ada faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah kota yang dapat mempengaruhi pertumbuhan belanja daerah. Contohnya, fluktuasi ekonomi nasional atau global, perubahan kebijakan pemerintah pusat, atau bencana alam yang tidak terduga dapat memiliki dampak signifikan pada belanja daerah.

Saat menganalisis pertumbuhan belanja daerah, semua faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan atau penurunan belanja daerah agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam perencanaan anggaran.

Saat ini, organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah, menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini mengharuskan setiap anggaran dikaitkan dengan sasaran kinerja yang spesifik. Artinya, tidak lagi cukup hanya menaikkan anggaran secara keseluruhan, tetapi harus ada hubungan yang jelas antara alokasi anggaran dan hasil yang diharapkan. Prinsip utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan belanja, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan anggaran yang baik dan mengawasi penggunaan anggaran secara tepat sesuai dengan tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, belanja daerah dapat tumbuh secara positif sambil menjaga stabilitas keuangan daerah.

Melalui analisis pertumbuhan belanja, kinerja keuangan dapat dievaluasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pertumbuhan belanja antara tahun 2018 dan 2021 menunjukkan tren yang baik, meskipun tingkat pertumbuhannya berbeda-beda antara tahun-tahun tersebut. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama periode tersebut adalah sebesar 21,56%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap tahun anggaran dan keadaan ekonomi dapat memberikan variasi dalam tingkat pertumbuhan belanja daerah.

Dalam kesimpulannya, analisis pertumbuhan belanja daerah memberikan gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah kota. Meskipun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan belanja, pemerintah daerah dapat mencapai pertumbuhan yang positif melalui perencanaan anggaran yang baik dan pengawasan anggaran yang efektif. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam perencanaan anggaran demi menjaga stabilitas keuangan daerah dan memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan menggunakan metode analisis belanja daerah. Dalam penelitian ini, dilakukan dua jenis analisis yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis varians belanja, ditemukan bahwa terdapat selisih rata-rata sebesar 26,7, sedangkan rata-rata penggunaan atau penyerapan anggaran belanja mencapai 73,14%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah dapat dinilai cukup baik dalam hal perencanaan anggaran dan upaya penggunaan anggaran yang efektif.

Hasil dari analisis varians ini juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih dari 90 persen menandakan penggunaan anggaran yang efisien, sementara penggunaan di bawah 90 persen dapat mengindikasikan adanya kekurangan dalam perencanaan anggaran. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam analisis data belanja daerah. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan perluasan jenis analisis yang dilakukan serta melakukan pengumpulan data primer yang dapat diperoleh secara langsung. Hal ini penting karena beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas jika hanya mengandalkan sumber data daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta, edisi pertama, hal, 35.
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 6(2), 26–35.
- Kainde, C. (2013). Analisis varians dan pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Kasi, A. M. K. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Mahmudi, S. E. (2012). *Pemanfaatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Oleh Incumbent (Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2005-2010)*.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Keem). Andi.
- Purwaningsih, E., & Priyono, N. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015-2019. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 24–38.
- Utami, T. V., & Astutik, E. P. (2022). Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget of Magelang Regency. *CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 2(1), 267–274.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).